

Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar

Taufik Hidayat^{a*}, Annie Mustika Putri^a, Neng Murialti^a

^a*Universitas Muhammadiyah Riau*

*Corresponding author: taufikhidayatn45@gmail.com

ABSTRAK

The government's performance is measured so that it can be seen how the government carries out what it is responsible for. The issue of local government performance is in the public spotlight because it has not shown good results that are felt directly by the community. Researchers took 25 OPDs of Kampar Regency as research objects. The purpose of this study was to determine whether Good Governance, Competence, and Accounting Control affect the Performance Accountability of Government Agencies. Collecting data using research instruments, data analysis is quantitative or statistical, with the aim of testing the hypothesis that has been set. The data analysis technique used Multiple Regression Analysis. The results of the validity test on each variable in this study are valid. The value of r -count greater than r -table is 0.304, so that r -count > r -table and the variables used are declared reliable. The normality test value is above 0.05 so that the residual is declared normal. In the F test, the significance is 0.00 or smaller than 0.05, it can be said that the regression equation is fixed. Partially that Good Governance and Accounting Control does not, while Competence have a significant influence significantly influence the Performance Accountability of Government Agencies in Kampar Regency.

Kata kunci: *Good governance, analysis, accountability*

Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Tanggung jawab ini menentukan tujuan dan alasan hidup dari OPD tersebut. Di dalamnya dijelaskan substansi tujuan, visi dan misi OPD, peran dan arahan yang seharusnya diwujudkan oleh OPD. Secara teoritis, kinerja para pegawai akan menjadi terarah dan jelas dengan adanya tujuan dan strategi dari OPD tersebut, strategi ini juga merupakan upaya memperbaiki pengarahannya (*steering*).

OPD tidak sekedar dibentuk, tetapi perlu dijaga dan terus berinovasi agar dari waktu ke waktu tetap mampu mempertanggungjawabkan substansi akuntabilitas dan alasan hidupnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan aspek pengelolaan (manajemen) kinerja, yang didalamnya meliputi sistem insentif dan disinsentif. OPD memberikan insentif kepada para pegawainya untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Insentif akan menghasilkan perbaikan-perbaikan kinerja pegawai. Insentif ini dapat berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan kinerja (remunerasi), dan lain-lain.

Birokrasi di dalam OPD diharapkan bertanggungjawab kepada masyarakat sebagai pelanggan. Pada saat ini, perlu diperhatikan agar OPD mampu meningkatkan kinerja aparatur. Dengan demikian, aparatur bertanggung jawab selain kepada pimpinan juga harus mendengarkan masyarakat dan melakukan penjaminan kualitas pada masyarakat selaku pelanggan. dengan harapan akan menekan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerja aparatur dan mencapai kepuasan masyarakat.

Dalam berbagai berita, tingkat akuntabilitas sebagian besar pemerintah daerah masih rendah, karena menurut menteri PAN-RB Asman Abnur, untuk menciptakan akuntabilitas kinerja di suatu instansi harus memiliki tata kelola yang baik serta berorientasi hasil. Bupati

Kampar mengakui perlunya pembenahan di lingkungan Pemkab Kampar untuk meningkatkan kualitas atau pertanggungjawaban kinerjanya. Dan beliau menegaskan dimana instansi harus memiliki semangat transparansi sehingga akan melahirkan pelayanan publik yang baik, berkinerja tinggi, berkompeten dan pembiayaan efisien. Salah satu kinerja yang akan diteliti yaitu kinerja Inspektorat Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Bapak Muhammad selaku Kepala Inspektorat (www.goriau.com, Januari 2019).

Dalam Penelitian Cahyani dan Utama (2015) pada OPD Kota Denpasar Bali menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun lain halnya dengan penelitian tentang pengaruh pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pernah dilakukan oleh Anjarwati (2012), Herawati (2011) dan Harsanti (2008), dimana penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari kedua penelitian tersebut terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. Dari uraian tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa ternyata akuntabilitas pun menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah masih rendah dan tata kelola yang kurang baik. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Kabupaten Kampar.

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Teori *Stewardship*

Stewardship theory dikembangkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991. *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik (Sekaran, 2006). Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory* (McTavish dan Loether, 1993).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Wibisono (2016) mengemukakan akuntabilitas dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak

pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh instansi publik, diantaranya:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
- b. Akuntabilitas Proses
- c. Akuntabilitas Program
- d. Akuntabilitas Kebijakan

Good Governance

Good governance yang dalam istilah bahasa memiliki arti tata kelola yang baik dimana menjadi tantangan bagi semua sector, terutama sektor publik di Indonesia. Salah satu penyebab utama *Good Governance* harus diimplementasikan karena masih kurang maksimalnya kinerja pemerintah yang dilaksanakan terutama oleh Inspektorat dalam suatu Pemerintah Daerah.

Good Governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha ataupun berkarya. *Good Governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Apriliani, 2018).

Kompetensi

Menurut Sedarmayanti (2017) mendefinisikan kompetensi aparatur adalah sebagai berikut: "Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior". Menurut Sedarmayanti (2017:236), komponen kompetensi adalah sebagai berikut: 1. Dorongan (*motives*) 2. Sifat (*traits*), 3. Citra Diri (*self concept*), 4. Pengetahuan (*knowledge*), 5. Keterampilan (*skill*).

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah sistem pengendalian yang berbasis akuntansi (Setyawan dkk., 2017). Menurut Hery (2009), tujuan dari pengendalian akuntansi adalah mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Menurut Setyawan dkk. (2017) pengendalian akuntansi mencakup sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Sistem akuntansi merupakan hal yang penting karena dapat dijadikan alat untuk memotivasi, mengukur dan memberikan sanksi atas tindakan pegawai dalam organisasi.

Pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD; badan pengawas keuangan; investor; kreditur; dan donator; analisis ekonomi dan pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Hipotesis

Hipotesis merupakan persepsi awal bersifat sementara yang masih diuji kebenarannya didukung oleh fakta-fakta yang membenarkannya. Penolakan atau penerimaannya tergantung dari hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang mendukung. Berdasarkan landasan teori diatas dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Good Governance juga dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien. Sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable*) pada publiknya yang diharapkan akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Suprasto, 2006).

Uraian tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas akan dapat meningkatkan *Good Governance*, karena adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat pada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas tercipta pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa Instansi Pemerintah dengan menjunjung tinggi *Good Governance* akan memudahkan instansi dalam mencapai Akuntabilitas Kinerja yang diharapkan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2016), yang menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

H₁ : *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi- fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil (Supadmi, 2018).

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Hasil penelitian terdahulu Supadmi (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H₂ : Kompetensi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja

Pengendalian diperlukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh orang-orang tertentu. Pengendalian akuntansi adalah proses yang dibuat untuk memberikan keyakinan yang andal mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Adanya pengendalian akuntansi maka instansi pemerintah dapat mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan. Pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Penelitian (Setiawan, 2013) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sama halnya dengan penelitian (Indudewi, 2009) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

H₃ : Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jika dilihat dari teori dan penelitian terdahulu masing-masing variabel terkait antara *Good Governance*, Kompetensi, Pengendalian Akuntansi yang memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana *Good Governance* esensi pemerintahan yang baik dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. (Yuda, 2009).

Menurut Mardiasmo (2012) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang penulis ajukan:

H₄: *Good Governance*, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen peneliti, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di 25 OPD Kabupaten Kampar karena adanya masalah mengenai hasil evaluasi SAKIP pada salah satu OPD Kabupaten Kampar yaitu pada Inspektorat Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat survey, dimana dalam melakukan penelitian untuk memperoleh fakta dan keterangan secara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pejabat OPD Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 4 orang pejabat untuk masing-masing OPD, yaitu 2 orang pejabat eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV dari 25 OPD yang akan dituju di Kabupaten Kampar.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan. Kriteria sampel yang ditetapkan adalah 2 orang pejabat Eselon III dan 2 orang pejabat Eselon IV pada tiap OPD Kabupaten Kampar, sehingga sebanyak 4 orang pejabat yang akan menjadi sampel pada penelitian ini, serta memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu dengan menggunakan kuesioner. Sumber data berupa tanggapan responden melalui kuesioner yang berbentuk pertanyaan secara terstruktur. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada 4 orang pejabat untuk setiap OPD yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga untuk 25 OPD yang akan peneliti lakukan membutuhkan 100 kuesioner untuk dibagikan kepada 100 orang pejabat OPD di Kabupaten Kampar.

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang penting, karena data akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei yaitu metode pengumpulan data primer dengan cara menyebar kuesioner kepada responden dalam

bentuk pertanyaan tertulis. Diukur dengan menggunakan skala likert dengan keterangan 1.Sangat Tidak Setuju (STS); 2.Tidak Setuju (TS); 3.Neutral (N); 4.Setuju (S); 5.Sangat Setuju (SS).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. Data diolah menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20. SPSS merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Uji ini dilakukan untuk menguji kesahihan nilai parameter yang dihasilkan oleh model. Rumus analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

- Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- X₁ : *Good Governance*
- X₂ : Kompetensi
- X₃ : Pengendalian Akuntansi
- e : Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 1 November sampai tanggal 11 November 2020. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada pejabat eselon III dan eselon IV. Peneliti menetapkan janji untuk pengambilan kuesioner selama 1 minggu terhitung sejak kuesioner diantarkan kepada responden atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara responden dan peneliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Dari pengembalian kuesioner yang telah disebar, 44 (44%) kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti serta dapat diolah oleh peneliti, dimana ada 14 OPD yang tidak mengembalikan kuesioner

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Kinerja (Y)	44	3,6667	4,7778	4,2854	0,3582
Good Governance (X ₁)	44	3,1765	4,3529	3,766	0,2044
Kompetensi (X ₂)	44	3,4545	4,5455	4,314	0,2373
Pengendalian Akuntansi (X ₃)	44	3,3333	4,5	4,0038	0,1368

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 1, dari 44 kuesioner yang diteliti, Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai total rata-rata sebesar 4,2854 dengan standar deviasi sebesar 0,3582. Hal ini menunjukkan adanya trend positif dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilihat dari nilai rata-rata mendekati nilai maksimum 4,778 yang berarti AKIP OPD Kabupaten Kampar tergolong baik.

Dapat diketahui bahwa instrument-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Pearson Correlation* yang nilainya lebih besar dari 0,3. Maka nilai df (*degree of freedom*) adalah $df = 44 - 2$ atau $df = 42$. r tabel angka 42 dengan signifikansi 0,05 atau 5%. Dari tabel dibawah ini diketahui bahwa r tabel 42 adalah 0,304.

Suatu pertanyaan dikatakan Valid jika $r\text{-tabel} < r\text{-hitung}$ atau $r\text{-tabel}$ lebih kecil dari r hitung. Maka diketahui bahwa hasil uji validitas dari tabel 2 diatas adalah valid, karena r tabel lebih besar dari r hitung.

Berdasarkan data diatas diperoleh nilai $r\text{-hitung} = 0,97868508$. dan $r\text{-tabel}$ adalah $0,29070645$. Maka dapat disimpulkan bahwa $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, sehingga variabel yang digunakan dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardised Residual</i>
N	44
<i>Absolute</i>	0,126059
<i>Positive</i>	0,094365
<i>Negative</i>	-0,12606
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,440
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,136

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan uji normalitas pada table 2 dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 1,440 dan *Asymp.Sig* 0,136 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan uji asumsi klasik dan hasil output menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan untuk melakukan uji regresi linear berganda.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
<i>Good Governance (X₁)</i>	0,496	2,016
Kompetensi (X ₂)	0,839	1,192
Pengendalian Akuntansi (X ₃)	0,567	1,764

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika VIF dibawah 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinear. Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel diatas menunjukkan variable bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variable bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig
(<i>Constant</i>)	0,298	0,768
<i>Good Governance</i>	0,717	0,478
Kompetensi	0,263	0,794
Pengendalian Akuntansi	1,709	0,287

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji glejser. Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi variabel bebas $>0,05$ yang berarti bahwa tidak terjadi heterosdastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji T / Regresi Berganda

Model	B	Uji t	Signifikansi
Constanta	2,306	0,184	0,855
Good Governance (X ₁)	0,053	0,277	0,783
Kompetensi (X ₂)	0,791	4,947	0,000
Pengendalian Akuntansi (X ₃)	0,053	0,037	0,970

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa koefisien β *Good Governance* bernilai positif sebesar 0,053, dan nilai signifikansi 0,783 > 0,05. Hal ini berarti bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Koefisien Kompetensi bernilai positif sebesar 0,791, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Dan koefisien β Pengendalian Akuntansi bernilai positif sebesar 0,053, dan nilai signifikansi 0,970 > 0,05. Hal ini berarti bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	F	Sig.
1 Regression	195,406	10,364	0,00
Residual	251,389		
Total	446,795		

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021

Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang didapat dengan derajat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa signifikansi adalah 0,00 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661	,437	0,395	2.448

Sumber: Data Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 7 nilai Adjusted R Square sebesar 0,395 ini menunjukkan 39,5% *Good Governance*, Kompetensi dan Pengendalian Akuntansi mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara 60,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi *Good Governance* pegawai di suatu instansi, maka secara signifikan tidak mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan dihasilkan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukan penelitian. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.

Tidak berpengaruhnya *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam penelitian ini penyebabnya dapat dilihat dari profil responden pada tabel 5 yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi masih sedikit yaitu 9 responden atau 20,45%, dari 44 responden hanya 9 responden yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, padahal untuk meningkatkan kualitas *Good Governance* di suatu instansi Pemerintah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang Akuntansi agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat tercapai sehingga tujuan dari *Good Governance* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan pemerintah yang kuat terwujud sesuai dengan teori Stewardship dalam penelitian ini.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rudi Susanto (2015) yang menyatakan *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dapat disimpulkan hasil ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Kampar keberadaan *Good Governance* masih memiliki nilai positif yang dapat menjelaskan bahwa dengan peningkatan nilai *Good Governance* dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, namun dipandang tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin tinggi Kompetensi dalam suatu instansi, maka semakin tinggi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan dihasilkan. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Kompetensi yang baik akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Kompetensi yang baik akan mencantumkan tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar hasil kinerja lebih efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Syachbrani (2014) dan Sofyani dan Akbar (2014) yang menyatakan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Kompetensi yang baik akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semakin baik. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan Kompetensi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukan penelitian. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak bergantung kepada Pengendalian Akuntansi yang baik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak mempermudah aparat pemerintah dalam menyusun dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya Pengendalian Akuntansi, tidak dapat mempermudah instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anjarwati (2012), Herawati (2011) dan Harsanti (2008) yang menyatakan Pengendalian Akuntansi tidak memiliki peranan penting dalam menerapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dapat disimpulkan hasil ini

menggambarkan bahwa di Kabupaten Kampar keberadaan Pengendalian Akuntansi memiliki nilai positif yang dapat menjelaskan bahwa dengan peningkatan nilai Pengendalian Akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, namun dipandang tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal ini terjadi karena ada kecenderungan menyerahkan AKIP kepada yang membidangi, dan kurangnya keterlibatan langsung dalam proses akuntabilitas kinerja. Pengendalian Akuntansi yang jelas yang dapat dimengerti harus disusun dengan baik sehingga pelaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dapat tercapai dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *good governance* dan Pengendalian Akuntansi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Kampar, sedangkan Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Kampar.

Keterbatasan penelitian ini yaitu variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 39,5%, sedangkan sisanya sebesar 60,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan belum dapat menjelaskan sepenuhnya pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan perubahan variabel-variabel lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti peraturan perundang-undangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Daftar Pustaka

- Anjarwati, Mei. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 1–7. doi:ISSN 2252-6765.
- Anthony, R.N., Dearden, dan Bedford. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi V. Jakarta: Erlangga.
- Ashidiqi Hasibi. (2018). Pengaruh Good Governance, Kompetensi dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kampar. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Auditya, Lucy dan Husaini. (2013). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1.
- Cahyani, N. M. M., & Utama, I. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Journal Akuntansi* Universitas Udayana 10(3), 824-840.
- Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). ISSN:2355-6854.
- Febriani. (2016). Penerapan Prinsip *Good Government Governance* dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi* Universitas Sanata Dharma
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil
- <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2020/02/10/kampar-peroleh-nilai-b-hasil-evaluasi-sakip-tahun-2019/>
- <https://riaupos.jawapos.com/>

- Kurniawan, Albert. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Setiawan, E. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Riau.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 10 No. 2.
- Suhady dan Desi Fernanda (2001). *Dasar-Dasar Pemerintahan yang Baik. Bahan Ajar Diklatpim di Tingkat IV*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Supadmi. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Syachbrani, Warka. 2014. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.